

PRINSIP KERAHASIAAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Mas Anienda Tien F.

Fakultas Hukum UPN"Veteran" Jatim

Abstrak

Berperkara melalui pengadilan biasa (nasional suatu negara) telah umum dianggap tidak efektif bagi kalangan pengusaha. Oleh karena itu penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan lembaga peradiln umum. Kelebihan tersebut antara lain dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dari publik. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan dalam hal prosedural dan administrasi. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang dialami. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak.

Dalam azas hukum acara perdata biasa menganut asas sidang terbuka untuk umum sehingga baik prosedur maupun putusan tersebut dapat diketahui oleh publik. Namun didalam prosedur arbitrase tidaklah demikian, seluruh rangkaian prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah private karena sifatnya yg confidential. Akibatnya u/ mendapatkan data perkembangan arbitrase di Indonesia sangat sulit.

Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini dapat saja dilakukan para pihak atau arbiter, konsep pelanggaran kerahasiaan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan alasan mencemarkan nama baik para pihak yang bersengketa yaitu berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata.

Undang-Undang No.30 tahun 1999 merumuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase. Wewenang pengadilan negeri dibatasi tanpa melampui apa yang telah diatur dalam undang-undang arbitrase sendiri. Wewenang pengadilan negeri hanya berlaku pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase. Tindakan ini diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar berjalan sesuai dengan prosedur.

Prinsip private dan confidential menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya kewenangan lembaga peradiln seperti apa yang telah ditentukan dalam undang-undang arbitrase.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa perdagangan, Prinsip dasar arbitrase, prinsip rahasia dan tertutup.

PENDAHULUAN

Setiap individu dalam hidup bermasyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan kepentingan sosial sebanyak mungkin. Pemenuhan kepentingan-kepentingan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan individu lainnya. Hukum merupakan salah satu norma sosial yang bertujuan untuk

mempertahankan kepentingan individu dalam setiap masyarakat dalam kaitannya kepentingan sosial individu hampir dipastikan akan berhubungan dengan kepentingan sosial individu lainnya. Kepentingan ini memunculkan pemenuhan hak dan kewajiban atas hubungan yang dijalin. Misalnya hubungan bisnis merupakan hubungan yang setiap hari timbul guna memenuhi kebutuhan setiap

individu mempertahankan hidup. Hubungan bisnis diantara pihak menuntut pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang yang harus disepakati bersama.

Hampir setiap hari ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi baik domestik maupun dengan dunia luar. Berlangsungnya kegiatan transaksi bisnis menyebabkan semuanya bergerak dinamis tetapi tetap menuntut suatu etika bisnis yang sehat. Para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus dapat menciptakan kontrak bisnis baik. Suatu hubungan bisnis harus berpegang pada prinsip itikad baik (*good faith*) sebagai bagian yang paling fundamental dalam hubungan bisnis. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang yang berbasis juga pada etika dagang yang sehat meliputi prinsip-prinsip dagang yang berbasis juga pada etika yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatuhan serta saling percaya niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek bisnis yang sehat.

Dari praktek bisnis yang tidak sehat tidak mungkin di hindari terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, semakin banyak terjadi frekuensi sengketa. Berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat di selesaikan, mengakibatkan perkembangan perekonomian tidak efisien. Dalam dunia bisnis dimana pola hubungan diantara para pelakunya akan lebih terorientasi pada hal-hal yang bersifat simple dan efisien oleh karena itu dibutuhkan kerangka yang mampu membingkai dan memadai kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi, yaitu dalam bentuk penyelesaian sengketa bisnis yang lebih efektif.

Badan peradilan umum yang digunakan sebagai tempat menyelesaikan sengketa selama ini menghadapi kendala-kendala seperti formalistik, membutuhkan

waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak murah. Hambatan-hambatan penggunaan badan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional terutama sengketa perdagangan telah memberikan motivasi untuk memilih lembaga atau cara lain.

Para pihak yang bersengketa dapat memilih di antara dua forum yang ada yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka yang dapat dilakukan "*In Court Disputes Settlement*" atau "*Out Of Court Disputes Settlement*". Adapun yang dimaksud dengan "*In Court Disputes Settlement*" adalah bentuk penyelesaian sengketa yang timbul melalui suatu proses litigasi lembaga peradilan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum dengan menggunakan forum dan prosedur berdasarkan kesepakatan para pihak-pihak. Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki karakter dan konsekuensi sendiri.

Alasan-alasan yang timbul mengapa arbitrase dipilih dalam menyelesaikan sengketa bisnis daripada pengadilan nasional yakni umumnya pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan (*confidence*) dari masyarakat, pengadilan nasional identik dengan sistem ekonomi, hukum, dan politik dari negara. Negara tempat pengadilan nasional tersebut berada yang berbeda dengan sistem pengusaha (bisnis). Sebaliknya arbitrase komersial internasional merupakan "Pengadilan Pengusaha" yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka (kalangan bisnis). Sebaliknya arbitrase merupakan "Pengadilan Pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan / keinginan mereka-mereka.

Seperti kita telah maklumi, berperkara melalui pengadilan biasa (nasional suatu negara) telah umum di

anggap tidak efektif bagi kalangan pengusaha. Masalah penanggungan perkara belum lagi adanya kongesti (tunggakan perkara yang harus diselesaikan yang berarti tertunda-tundanya keputusan yang hendak dikeluarkan hakim yang menyelidiki tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara saja pada waktu yang bersamaan. Dalam prakteknya ia dihadapkan lebih dari dua tiga perkara dalam suatu masa tugasnya. Akibatnya ia harus membagi-bagikan prioritas dan waktu untuk perkara. Perkara mana yang didahulukan dan mana yang tidak terlalu mendesak.

Sehubungan dengan alasan-alasan di atas perlu pula diperhatikan bahwa banyak pengadilan tidak mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum konversial internasional. Sehingga keadaan pula mengapa para pihak lebih suka cara arbitrase.

Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan *UU No. 35 tahun 1999* sebagaimana diubah lagi dengan *UU No. 4 tahun 2004* tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat 1 telah meletakkan dasar bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan *atas dasar perdamaian (arbitrage)* tetap diperbolehkan. Mengingat ada sejumlah hambatan yang timbul di lingkungan peradilan pada saat menyelesaikan perkara atau sengketa bisnis. Kontrak bisnis hampir semuanya menggunakan atau mencantumkan klausul arbitrase di dalamnya, artinya lembaga arbitrase sudah menjadi alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam dunia bisnis sangat menonjol peran dan penggunaan klausul arbitrase. Pihak pelaku bisnis dari negara-negara maju, selalu menuntut pencantuman klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Sebaliknya ada keengganan bagi pihak pelaku bisnis untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa di ikat dengan perjanjian arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip para pihak memiliki otonomi luas (*partij autonomi*) dimana para pihak bebas menentukan isi perjanjian, prosedur arbitrase, pilihan forum (*Chose Of Forum*). Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu para pihak yang bersengketa maka arbitrase tidak bisa dipergunakan sebagai forum penyelesaian sengketa. Prinsip ini merupakan implementasi azas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*). Sedangkan prinsip kebebasan berkontrak merupakan manifestasi yang bersifat kontraktual adalah dibolehkan dan setiap perikatan kontraktual yang dibuat dalam keadaan bebas.

Hubungan hukum yang baik yang bersifat publik maupun privat dilandaskan para prinsip kebebasan persamaan dan solidaritas. Dengan prinsip kebebasan, subyek hukum bebas untuk melakukan apa yang diinginkan dengan dibatasi oleh kebebasan orang lain dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Prinsip perjanjian arbitrase mengikat para pihak. Kewenangan arbitrase harus berdasarkan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Kesepakatan para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dituangkan pada perjanjian arbitrase tersendiri atau terpisah dengan perjanjian pokoknya, maupun dibuat ke dalam satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya.

Berbagai macam peraturan yang pernah disahkan di Indonesia untuk melegalisasi arbitrase.

- Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement opde Rechtswordering, Staatsblad 1847 : 25*) dan pasal 337 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227*). Ketentuan ini tidak berlaku lagi setelah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berlaku.

- Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang ratifikasi persetujuan “*Convention On Settlement of Investmen Disputes Between States and National of Other States*” (ICSID) atau konvensi penyelesaian sengketa modal asing antar negara.
- PERMA No. 1 tahun 1990 aturan pelaksanaan atas pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Ketentuan ini telah di adaptasi menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga ketentuan ini tidak berlaku lagi.
- *Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Adapun falsafah yang melandasi undang-undangan ini antara lain adalah :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perdata disamping dapat diajukan keperadilan umum juga terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebelum undang-undang ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.

Peraturan arbitrase secara Internasional lainnya yang juga menjadi acuan pelaksanaan arbitrase nasional lain adalah UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Kelebihan tersebut antara lain :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi

- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan dan pengalaman.
- d. Serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- e. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- f. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedure) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya yang disebutkan di atas tidak semua benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, sedangkan Pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasikan harapan demikian.

Disamping beberapa kelebihan arbitrase seperti yang telah dikemukakan di atas, namun arbitrase masih mempunyai beberapa kelemahan antara lain.

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat forum arbitrase mana yang akan dipilih.
2. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya Preseden Hukum (*Legal Presedent*) atau keterikatan dengan putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Karena tidak adanya presiden ini maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan yang saling berlawanan (*conflating decisions*)
3. Arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang sangat tinggi, terutama dalam hal arbitrase di luar negeri.
4. Keputusan arbitrase selalu bergantung kepada arbitrase mengeluarkan keputusan.

Di pengadilan, perkara perdata dapat diikuti oleh orang-orang luar dan keputusan-keputusannya juga diucapkan

dalam sidang terbuka dengan kemungkinan adanya reportase di dalam media massa. Namun di dalam prosedur arbitrase tidaklah demikian, pertimbangannya adalah karena sifat “konfidensial”. Akibatnya untuk mendapatkan data perkembangan arbitrase di Indonesia agak sulit.

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya keputusannya arbitrase langsung mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk menutup kemungkinan penggunaan upaya hukum selanjutnya yang berbeda dengan putusan lembaga peradilan umum yang masih terbuka peluang untuk menggunakan berbagai upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Undang-undang No. 30 tahun 1999 pasal 59 mengatur bahwa keputusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi.

Prinsip konfidensial harus dilaksanakan mulai pemeriksaan sengketa arbitrase sampai dengan putusan. Tetapi kemudian setelah putusan arbitrase dijatuhkan maka putusan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Ini berarti prinsip konfidensial tersebut yang semula berlaku menjadi tidak berlaku oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam tesis ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini didasarkan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang berlaku yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan Hukum

Badan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa badan hukum primer dan badan hukum primer dan badan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Langkah-langkah Penelitian Hukum

Langkah penelitian hukum untuk kajian akademis di isyaratkan bahwa masalah yang diteliti merupakan masalah hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan telaah yang mendalam mengenai Perundang-undangan di bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Analisis Bahan Hukum

Analisis masalah dalam tugas penulisan ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Kerahasiaan Dalam UU. No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengecualian Terhadap Prinsip Sidang Terbuka Untuk Umum

Salah satu prinsip hukum acara perdata adalah sifat terbukanya persidangan. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di perbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan prinsip sidang terbuka untuk umum adalah : (Sudikno Mertokusumo : 1993)

- Memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan.
- Menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang “*fair*”, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

- c. Berperan dalam pembentukan hukum melalui yuris prodensi. Putusan hakim terutama pertimbangan. Pertimbangannya terbuka dan dapat dipublikasikan sehingga dapat dijadikan oleh hakim-hakim lain dalam menjatuhkan putusan.

Secara formil asas ini membuka kesempatan “*social control*” yaitu dengan maksud masyarakat dapat mengetahui secara langsung terhadap proses hukum sehingga dapat memberikan kontrol langsung demi terwujudnya keadilan.

Pengertian azas terbuka untuk umum meliputi proses pemeriksaan Pengadilan hingga putusan hakim. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang terbuka. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Apabila hakim hendak mengadakan permusyawaratan tentang perkara yang diperiksa, maka permusyawaratan berlaku dalam sidang tertutup.

Pemeriksaan perkara di muka hakim berjalan dengan sidang terbuka, kecuali jika ada peraturan lain yang ditetapkan oleh undang-undang atau kecuali jika hakim berdasar alasan-alasan yang penting memerintahkan bahwa sidang akan berjalan dengan pintu tertutup. Ketentuan ini bisa kita lihat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang mengatur :

Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Misalnya pemeriksaan pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering di adakan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan

dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

Di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa menurut arbitrase adalah tertutup. Hal ini menunjukkan perkecualian sidang terbuka untuk umum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Pengaturan pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 merupakan “Lex Specialist” terhadap ketentuan “Lex Generalis” pasal 19 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004.

Prinsip Pemeriksaan Arbitrase Secara Tertutup

Prinsip ini seringkali di unggulkan karena dalam pemeriksaan dalam pengadilan biasa adalah terbuka untuk umum jadi dimungkinkan untuk semua orang mengetahui proses hukum. Arbitrase dalam pengertian yang diberikan oleh Alan Redfron dan Martin Hunter menyebutkan sebagai “*Private Proses*” yang berarti bahwa penyelesaian sengketa menurut arbitrase adalah bersifat “private”, tidak diketahui oleh publik dan rahasia. Proses arbitrase yang demikian dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa sebagai satu wujud prinsip *partij autonomy*, agar kerahasiaan tentang perusahaan para pihak tetap terjamin, kredibilitas mereka juga terjaga.

Prinsip Kerahasiaan yang Berkenaan dengan Proses Arbitrase

Prinsip kerahasiaan berkenaan dengan proses arbitrase karena setiap tahap dilakukan dengan secara tertutup mulai dari pemeriksaan *statement of claim*. *Statement of defence*, dokumen, saksi dan ahli maupun *oral hearing* dengan para pihak. Karena dilakukan secara tertutup dan rahasia maka hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan hadir yaitu para pihak, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, para saksi.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengatur bahwa “*Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup*”. Ketentuan di atas jelas menyatakan semua

pemeriksaan sengketa berlangsung tertutup untuk umum. Peraturan prosedur BANI juga menegaskan prinsip kerahasiaan yang diatur pasal 14 ayat 5 adalah pada saat pemeriksaan sengketa. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 27 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 maupun peraturan prosedur BANI tidak memberikan pengecualian terhadap sifat tertutupnya sidang pemeriksaan dalam proses arbitrase. Bahkan, para pihak juga tidak boleh mengesampingkan ketentuan prinsip tertutup ini. Hal ini disebabkan dari formulasi pasal 27 tersebut memberikan indikasi akan sifat memaksa dari ketentuan tersebut, dengan mengatur bahwa “*semua*” pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Jadi menutup kemungkinan adanya penyimpangan. Artinya jika para pihak menghendaki pemeriksaan tersebut di publikasikan, maka kewajiban para pihak sendirilah untuk mempublikasikannya.

Prinsip tidak boleh dipublikasikan

Prinsip kerahasiaan yang berkaitan dengan putusan di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup. Pengertian *Private and Confidential* meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, obyek, prosedur hingga putusan. Berdasarkan spirit “confidentiality” maka putusan pun harus diucapkan dengan pintu tertutup. Di dalam peraturan prosedur BANI juga demikian tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup.

Prinsip sidang terbuka untuk umum dalam “in court dispute settlement” bersifat mutlak dan permanen. Prinsip tersebut tidak boleh ditawar-tawar, kecuali dalam hal tertentu yang dibenarkan sendiri oleh undang-undang. Berbeda dengan pengaturan arbitrase internasional. ICSID misalnya bahwa dalam ketentuannya putusan arbitrase dilakukan dengan pintu

tertutup dan rahasia namun azas ini dapat di kesampingkan oleh para pihak.

Ketentuan pasal 48 ayat 5 ICSID mengatur bahwa “*The centre shall not publish the award without the consent of the parties*”, putusan tidak boleh dipublikasikan oleh centre tanpa persetujuan para pihak. Memang ketentuan ini ditujukan terhadap putusan, dan tidak disinggung tentang kebolehan mempublikasikan pemeriksaan. Akan tetapi kalau putusan boleh dipublikasikan asal atas persetujuan para pihak, hal itu memberi syarat akan kebolehan mengadakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum asal pada pihak menyetujui.

Dalam ketentuan arbitrase internasional lain seperti UNCITRAL juga memberikan kesempatan terbukanya sidang untuk umum. Perumusannya lebih lunak dari apa yang diatur dalam pasal 48 ayat 5 ICSID. ICSID merumuskan peraturan tersebut lebih bersifat larangan. Sedangkan pengaturan dalam UNCITRAL lebih bersifat fakultatif, pasal 32 ayat 5 UNCITRAL arbitration rule mengatur “the award may be made public only with the consent of both parties”. Perkataan-perkataan “*may*” atau “*dapat*” yang langsung di gantungkan dengan syarat “*only with the consent of parties*”. Jadi putusan dapat diumumkan dengan ketentuan tersebut hanya mengenai kebolehan mempublikasikan putusan asal atas persetujuan para pihak. Namun secara analogis meliputi kebolehan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Menurut pasal 57 UU No. 30 tahun 1999 mengatur bahwa putusan diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Karena masih dalam rangkaian hukum acara arbitrase maka putusan oleh majelis arbitrase dapat diucapkan dalam pintu tertutup. Putusan arbitrase dapat dipublikasikan artinya hasil putusan atas sengketa diketahui oleh publik dan ini merupakan di luar proses persidangan arbitrase. Agar lebih maka menjadi jelas mengenai konsep “private and confidential” yakni meliputi pemeriksaan sengketa sampai dengan pembacaan putusan arbitrase.

Kewajiban Para Pihak Dalam Hal Prinsip Kerahasiaan

Kelebihan penyelesaian sengketa menurut Arbitrase adalah *otonomi para pihak*. Para pihak yang bersengketa berhak penuh dalam memilih forum arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, arbiter dan bahasa. Termasuk dilaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase secara tertutup dan rahasia. Para pihak menginginkan agar penyelesaian sengketa bisnis menurut arbitrase tertutup dan tidak diketahui oleh publik agar “*Corporage Image*” terjaga.

Di dalam berbagai referensi yang membahas arbitrase tidak dijumpai tentang kewajiban khusus para pihak dalam menjaga prinsip *private and confidential*. Oleh karena prinsip tersebut dibuat sendiri oleh para pihak sehingga para pihak mempunyai kewajiban moral agar proses arbitrase berdasarkan motivasi *private and confidential* sesuai yang dikehendaki.

Secara umum kewajiban para pihak dalam prinsip kerahasiaan berlaku sama dengan kewajiban yang di emban oleh arbiter. Misalnya memberikan informasi mengenai segala hal tentang sengketa kepada pihak berkompeten tanpa persetujuan para pihak itu sendiri. Apabila prinsip kerahasiaan dilanggar oleh para pihak maka para pihak sendiri yang menentukan sanksinya berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat.

KESIMPULAN

Prinsip *Private and Confidential* merupakan pengecualian prinsip sidang terbuka untuk umum yang berlaku dalam hukum acara perdata biasa. Pengaturan prinsip *Private and Confidential* adalah menghindari publisitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap para pihak yang bersengketa. Prinsip *Private and Confidential* yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 pasal 37 menyangkut setiap tahap dalam pemeriksaan sengketa sampai dengan pembacaan putusan.

Para pihak yang bersengketa maupun arbiter berkewajiban menjaga prinsip kerahasiaan mulai dari pemeriksaan hingga pembacaan putusan. Jika terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan maka digolongkan dalam wan prestasi. Karena pada dasarnya arbitrase adalah sebuah perjanjian dimana para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa mempunyai kewajiban untuk memenuhi sesuai dalam perjanjian yang dibuat.

Untuk membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa menurut arbitrase agar berjalan sesuai yang dikehendaki para pihak maka diperlukan campur tangan pengadilan. Kewenangan lembaga pengadilan ini bersifat limitative artinya tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam aturan Undang-Undang No. 30 tahun 1999. dengan adanya kewenangan lembaga

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Arbitrase Internasional*, Rajawali Press, Jakarta 1991
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Distionary*, St. Paul, Minnesota, USA : West Publishing Co., 1968.
- David, Rene, *Arbitrase In International Trade*, Kluwer, Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1985.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1978
- Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standart Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, 1993. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I)
- Kantaatmadja, Komar. *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia*” dalam Hendarmin Djarab, “*Prospek dan Pelaksanaan*

- Arbitrase di Indonesia*". Cita Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lew, Julian DM, *Applicable Law In International Commercial Arbitration*, Oceana Publications, Inc, 1978
- Longdong, Tineke Tuegeh Louise, *Azas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Radjagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Candra Pratama, Jakarta, 2000.
- Redfern, Alan and Martin Hunter, *International Commercial Arbitration*, Sweet & Maxwell, London 1980.
- Peraturan Perundang-Undangan
Burgerlijk Wetboek (BW) Stb. 1847-23)
Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau reglemen Indonesia yang diperbaruhi (RIB) STB 1941-44
Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara tahun 1999 No. 138 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3872.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI 1970 No. 14 dan TNLRI No. 2951) sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI tahun 1999 No. 147 dan TNLRI No. 3879)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI 1970 No. 14 dan TNLRI No. 2951) sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI tahun 1999 No. 147 dan TNLRI No. 3879)